



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 65 /2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan Perangkat Daerah melalui pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah pada periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya hasil penilaian dan keputusan rapat tim penilai telah ditentukan hasil akhir penilaian Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 31 Januari 2025, maka perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

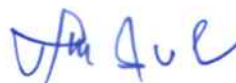
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi dalam Kategori I (Dinas, Badan, Sekretariat, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran, dan Rumah Sakit Umum Daerah) dan Kategori II (Kecamatan).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 65 /2025
 TANGGAL 12 Februari 2025.

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

KATEGORI I

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
				DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)						
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	100,00	71,34	90,92	90,00	96,27	86,55	100%	1,00	85,55	1	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	24,97	13,64	13,50	14,44						
		Nilai Aspek	100,00	87,13									
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Nilai	100,00	60,13	90,77	84,62	100,00	82,35	100%	0,00	82,35	2	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	21,05	13,62	12,69	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	83,88									
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemandam Kebakaran	Nilai	88,91	64,47	91,33	90,00	99,29	82,44	100%	1,00	81,44	3	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,78	22,56	13,70	13,50	14,89						
		Nilai Aspek	88,91	86,27									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGLOLAAN UP/GU (15%)						
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	89,78	69,30	84,52	81,82	99,80	82,13	100%	0,75	81,38	4	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,96	24,25	12,68	12,27	14,97						
		Nilai Aspek	89,78	83,86									
5.	Inspektorat	Nilai	100,00	65,62	80,00	66,67	100,00	79,97	100%	0,00	79,97	5	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	22,97	12,00	10,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	78,07									
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	100,00	59,70	84,00	73,33	100,00	79,50	100%	0,00	79,50	6	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	20,90	12,60	11,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	79,26									
7.	Sekretariat Daerah	Nilai	89,99	65,27	84,57	80,95	83,33	78,17	100%	1,00	77,17	7	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	18,00	22,84	12,69	12,14	12,50						
		Nilai Aspek	89,99	78,53									
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	84,69	74,72	80,00	66,67	83,33	77,59	100%	0,75	76,84	8	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	16,94	26,15	12,00	10,00	12,50						
		Nilai Aspek	84,69	76,18									




No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	100,00	59,28	76,96	63,24	98,89	76,61	100%	1,00	75,61	9	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	20,75	11,54	9,49	14,83						
		Nilai Aspek	100,00	74,59									
10.	Dinas Perhubungan	Nilai	100,00	61,31	74,00	66,67	83,33	75,06	100%	0,00	75,06	10	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	21,46	11,10	10,00	12,50						
		Nilai Aspek	100,00	71,33									
11.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai	88,51	53,05	86,15	76,92	100,00	75,73	100%	1,00	74,73	11	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,70	18,57	12,92	11,54	15,00						
		Nilai Aspek	88,51	79,03									
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	88,88	51,08	60,00	100,00	100,00	74,65	100%	0,00	74,65	12	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,78	17,88	9,00	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	88,88	77,77									
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	89,30	53,06	81,50	77,78	100,00	75,32	100%	0,75	74,57	13	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,86	18,57	12,23	11,67	15,00						
		Nilai Aspek	89,30	78,08									




No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
14.	Sekretariat DPRD	Nilai	100,00	66,96	0,00	0,00	58,08	52,15	70%	0,00	74,50	14	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	23,44	0,00	0,00	8,71						
		Nilai Aspek	100,00	62,52									
15.	Badan Pendapatan Daerah	Nilai	100,00	51,71	75,56	63,16	100,00	73,91	100%	0,00	73,91	15	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	18,10	11,33	9,47	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	72,61									
16.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Nilai	86,31	57,82	82,71	75,00	87,50	74,28	100%	1,00	73,28	16	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,26	20,24	12,41	11,25	13,13						
		Nilai Aspek	86,31	75,76									
17.	Dinas Sosial	Nilai	89,68	63,43	72,92	61,54	85,71	73,16	100%	0,00	73,16	17	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,94	22,20	10,94	9,23	12,86						
		Nilai Aspek	89,68	70,90									
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	100,00	78,78	56,86	30,77	74,21	71,85	100%	0,00	71,85	18	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	27,57	8,53	4,62	11,13						
		Nilai Aspek	100,00	60,16									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	100,00	64,89	62,50	37,50	100,00	72,71	100%	1,00	71,71	19	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	22,71	9,38	5,63	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	66,22									
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	100,00	61,72	66,00	50,00	83,33	71,50	100%	1,00	70,50	20	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	21,60	9,90	7,50	12,50						
		Nilai Aspek	100,00	65,26									
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	86,75	50,39	75,58	60,00	100,00	70,32	100%	1,00	69,32	21	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,35	17,64	11,34	9,00	15,00						
		Nilai Aspek	86,75	71,49									
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	100,00	55,38	70,00	50,00	75,00	68,63	100%	0,00	68,63	22	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	19,38	10,50	7,50	11,25						
		Nilai Aspek	100,00	62,59									
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	89,60	55,09	56,80	33,33	100,00	65,72	100%	0,00	65,72	23	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,92	19,28	8,52	5,00	15,00						
		Nilai Aspek	89,60	61,31									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
24.	Dinas Kesehatan	Nilai	89,05	61,31	52,66	27,59	100,00	66,31	100%	1,00	65,31	24	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,81	21,46	7,90	4,14	15,00						
		Nilai Aspek	89,05	60,39									
25.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim	Nilai	100,00	61,21	70,78	52,63	33,33	64,93	100%	0,00	64,93	25	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	21,42	10,62	7,89	5,00						
		Nilai Aspek	100,00	54,49									
26.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	89,33	39,89	82,57	74,32	50,00	62,86	100%	1,00	61,86	26	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,87	13,96	12,39	11,15	7,50						
		Nilai Aspek	89,33	61,70									
27.	Dinas Tenaga Kerja	Nilai	88,52	45,65	44,21	42,11	99,50	61,55	100%	1,00	59,44	27	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,70	15,98	6,63	6,32	14,92						
		Nilai Aspek	88,52	57,87									
28.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai	86,47	45,19	68,77	53,38	60,00	60,44	100%	1,00	59,08	28	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	17,29	15,82	10,32	8,01	9,00						
		Nilai Aspek	86,47	56,84									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
29.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	84,61	33,73	74,56	58,64	49,73	56,17	100%	1,00	55,17	29	Kurang
		Bobot											
		Nilai Akhir	16,92	11,80	11,18	8,80	7,46						
		Nilai Aspek	84,61	54,16									

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 65 /2025
 TANGGAL 12 Februari 2025

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024




KATEGORI II




No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
1.	Kecamatan Upau	Nilai	100,00	75,99	100,00	100,00	100,00	91,60	100%	1,00	90,60	1	Baik
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	26,60	15,00	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	94,00									
2.	Kecamatan Haruai	Nilai	100,00	73,42	92,00	100,00	100,00	89,50	100%	0,00	89,50	2	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	25,70	13,80	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	91,35									
3.	Kecamatan Tanjung	Nilai	100,00	69,86	97,00	100,00	100,00	89,00	100%	0,75	88,25	3	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	24,45	14,55	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	91,72									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
4.	Kecamatan Jaro	Nilai	100,00	77,65	0,00	0,00	92,86	61,10	70%	0,00	87,29	4	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	27,18	0,00	0,00	13,93						
		Nilai Aspek	100,00	85,25									
5.	Kecamatan Bintang Ara	Nilai	100,00	67,83	96,00	100,00	100,00	88,14	100%	1,00	87,14	5	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	23,74	14,40	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	90,96									
6.	Kecamatan Pugaan	Nilai	100,00	74,25	0,00	0,00	100,00	60,99	70%	0,00	87,12	6	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	25,99	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	87,12									
7.	Kecamatan Muara Harus	Nilai	100,00	73,15	0,00	0,00	100,00	60,60	70%	0,00	86,57	7	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	25,60	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	86,57									
8.	Kecamatan Banua Lawas	Nilai	100,00	71,37	0,00	0,00	100,00	59,98	70%	0,00	85,68	8	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	24,98	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	85,68									

188

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
9.	Kecamatan Kelua	Nilai	100,00	77,73	60,00	100,00	100,00	86,21	100%	0,75	85,46	9	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	27,21	9,00	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	84,43									
10.	Kecamatan Tanta	Nilai	100,00	73,83	0,00	0,00	91,67	59,59	70%	0,00	85,13	10	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	25,84	0,00	0,00	13,75						
		Nilai Aspek	100,00	82,75									
11.	Kecamatan Muara Uya	Nilai	100,00	59,47	100,00	100,00	90,91	84,45	100%	1,00	83,45	11	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	20,81	15,00	15,00	13,64						
		Nilai Aspek	100,00	87,59									
12.	Kecamatan Murung Pudak	Nilai	100,00	65,82	85,00	75,00	88,89	80,37	100%	0,75	79,62	12	Cukup
		Bobot											
		Nilai Akhir	20,00	23,04	12,75	11,25	13,33						
		Nilai Aspek	88,30	78,68									

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

